

EKONOMI ISLAM SARANA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT MADANI

Nurnasrina

Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Ekonomi Islam merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani. Kegagalan sistem konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai sosial dan nilai normatif moral masyarakat sehingga sistem itu dianggap gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Untuk itu instrumen ekonomi syari'ah merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan ekonomi masyarakat madani melalui instrumen baitul maal, lembaga zakat, lembaga wakaf, sedekah dan sebagainya.

Economic of Islam is supporting facilities for in realizing public chartered investment counsel madani. Fails of conventional system makes happened variation from value social and normative value of public morale so that the system is assumed to fails in forming faciliti public chartered investment counsel. For the purpose intstrument chartered investment counsel syari'ah is one of alternative in forming of public chartered investment counsel madani with instrument treasure house, religious obligatory institute, communal ownership institute, alms and all that.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Masyarakat Madani*

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian masyarakat. Banyak Negara yang ada didunia ini melakukan pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*), pendekatan ini umumnya lebih berkembang di dunia barat. Di balik keberhasilan tersebut, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi.¹

Hal ini dapat dilihat dalam konsep kapitalis pada persoalan mengasuh dan merawat anak, menurut mereka memerlukan pengorbanan yang besar dan dianggap sebagai suatu kerugian dalam ukuran materialis. Pemahaman mentalitas pasar yang mendorong untuk memenuhi kepuasan/kepentingan pribadi telah disuntikan kedalam keluarga, sehingga menyebabkan para orang tua tidak mampu untuk berhubungan baik satu sama lainnya. Akibatnya adalah runtuhnya sistem keluarga didalam kehidupan berumah tangga. Terjadi peningkatan hubungan seks bebas, perceraian dan keluarga dengan orang tua tunggal menimbulkan

¹M. Umar Chapra, 2001. *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Edisi terjemah, (Jakarta: SEBI), hal. 45.

penderitaan emosional, kejiwaan, serta material pada anak-anak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan keruntuhan kontrol sosial dalam masyarakat.

Kondisi ini menjadi semakin buruk, ketika sejumlah masyarakat terperangkap dalam keganananan roda kemiskinan, hidup dalam penderitaan di kota-kota besar bagaikan terpenjara, tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi.² Realitas ini menyebar dan telah menjangkiti hampir seluruh negeri, termasuk negeri-negeri muslim. Tren atau kecenderungan kemiskinan juga mengarah menjadi semakin buruk hampir tak terkendalikan.

Dampak yang lebih jelas adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang dan meninggalkan kemiskinan merajalela. Ditambah dengan peningkatan busung lapar yang akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit. Kekacauan juga terindikasi pada kesenjangan pertumbuhan pasar uang (*money market*) dan pasar obligasi (*bond market*) berikut pasar sekundernya (*secondary market*) yang begitu cepat, hingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan perdagangan di sektor ril. Perkembangan baik kualitas maupun kuantitas transaksi di pasar ini berakibat ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang.

Berdasarkan data yang dimiliki sebuah NGO ekonomi di AS, volume transaksi yang terjadi di pasar uang dan pasar derivatif mencapai 1,5 triliun dolar AS dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS setiap tahun.³

Sedangkan data World Bank terbaru menunjukkan volume transaksi di pasar uang mencapai 500 triliun dolar AS, sedangkan volume transaksi yang terjadi di sektor riil hanya 6 triliun dolar AS dalam satu tahun.⁴ Besarnya volume pasar uang dan pasar derivatif adalah cerminan akumulasi kekayaan para '*capitalis global*'. Ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang sangat berbahaya. Sistem kredit atau sistem hutang juga telah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Mekanisme bunga (*interest rate*) yang juga menggurita bersama sistem hutang ini, kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Kebangkrutan ekonomi sedang menghantui berbagai Negara dan bahkan juga perorangan akibat perangkap sistem bunga dan pemakaian kartu kredit yang berlebihan akibat dorongan keinginan syahwat tersebut sehingga terjadi peningkatan hutang yang luar biasa.⁵

Pandangan Islam Tentang Ekonomi

Khurshid Ahmad pernah melontarkan pertanyaan apakah masyarakat muslim bisa membangun perekonomian dengan mengikuti sistem kapitalis, sosialis maupun derivasinya, dengan ketergantungan (*depedency*) yang begitu kuat? atau

² *Ibid.*, hal. 46.

³ Ali Sakti, *Kegagalan Ekonomi Global*, Republika, 14 Maret 2002.

⁴ Laporan World Bank, 2004.

⁵ Berdasarkan laporan Gatraonline, 26 Desember 2001.

haruskah dilakukan rekonstruksi sosial-ekonomi secara total dengan asumsi, gagasan dan pola yang unik dan bernilai khusus untuk pembangunan dalam masyarakat muslim?⁶

Sebagai pemikir ekonomi muslim, Khursid Ahmad tentu berangkat dari realitas yang terjadi di negeri-negeri muslim. Di mana hampir sebagian besarnya memiliki sumber daya yang luar biasa tetapi keadaan ekonominya tetap tak berkembang, standar hidup rakyatnya masih rendah, dan bahkan cenderung hidup dalam keadaan *subsisten*. Mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidakseimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial sebagai hubungan 'pusat-pinggiran' (*centre-periphery relationship*).

Dunia Islam mengalami paradoks, ketika menggunakan *prototipe* pertumbuhan sebagai pola pembangunan yang dirancang pakar dan praktisi barat yang kemudian 'dijual' kepada perencana negara muslim melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, infiltrasi intelektual dan cara lainnya. Banyak kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan bahwa strategi imitasi gagal untuk menghasilkan kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islami. Untuk mengurai persoalan pelik yang dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka befikir.

Kerangka befikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan di atas. Dalam kerangka befikir tersebut harus dicanangkan sebuah premis baru bahwa pembangunan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Al-Qur'an dan As-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar. Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif. Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan *ideal type*, kendatipun juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik-ekonomi yang khas dari kanzah peradabannya.⁷ Sehingga akan terjadi kesulitan besar dan bahkan cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh kedalam masyarakat muslim, hal ini disebabkan adanya perbedaan

⁶Khursid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam Ainur R. Sophian (Ed) 1997, "Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam", (Surabaya: Risalah Gusti). hal. 1.

⁷*Ibid.*, hal. 7-8.

mendasar yang membentuk bangunan kemasyarakatan dari masing-masing peradaban.

Pendekatan Islam haruslah jelas-jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu sendiri. Konsep pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam Islam mempunyai pengertian khusus dan unik. Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi (*social justice and human rights*), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda.

Berdasarkan kronologis perbincangan di atas menjadi sangat relevan untuk mengkaji pandangan Islam dalam memecahkan persoalan ekonomi. Hal ini bermuara pada pengkajian konsep-konsep dasar Ilmu Ekonomi Islam untuk melakukan transformasi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Harus diakui bahwa proyek ilmu ekonomi Islam dan Islamisasi ilmu ekonomi telah menjadi obor terdepan bagi proyek Islamisasi ilmu. Bahkan para praktisi perbankan dan keuangan Islam juga telah berhasil mengukuhkan terwujudnya sistem keuangan Islam secara global dan diakui eksistensinya dalam percaturan ekonomi pada masa sekarang.

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*). *Worldview* Islam yang menjadi dasar ini oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai pendekatan istilah seperti; Maulana al-Maududi mengistilahkannya dengan *Islami nazariat (Islamic Vision)*, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islami (Islamic Vision)*, Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islami (Islamic Principle)*, sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya *Ru'yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview)*.⁸ Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama' dan Cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (*worldview*) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat. *Worldview* ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berfikir (*mental framework*).

Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu dalam aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan fitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya tersendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Islam yang diyakini

⁸Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", *Islamia Tahun II* No. 5, April-Juni 2005, hal. 11.

sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan.⁹ *Worldview* Islam memberikan pijakan bahwa umat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh sumber kehidupan (*resources*) yang tersedia adalah amanah-Nya, maka secara otomatis umat manusia memiliki hubungan persaudaraan yang alamiah dan mereka juga harus bertanggungjawab kepada-Nya. Oleh karena itu manusia tidak secara mutlak bebas untuk melakukan apa saja, akan tetapi mereka diharapkan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) dan berinteraksi antara satu dengan lainnya serta membangun lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perwujudan kesejahteraan bersama (*mutual welfare*) setiap individu, tanpa melihat apakah mereka kaya atau miskin, hitam atau putih, lelaki atau perempuan serta anak-anak atau orang dewasa. Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian tujuan materi, akan tetapi juga tujuan spiritual dan kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan *anomie*.¹⁰

Islam menekankan pembangunan insan seutuhnya (*human development*) menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiin*).¹¹ Pembangunan mendasarkan diri pada konsep *tazkiyah an-nafs* dengan titik tumpu pada penyempurnaan akhlak dan kepribadian. Karena pribadi adalah bagian penting dalam pembentukan peradaban. Asas ketenangan (*internal harmony*) merupakan hasil dari proses *tazkiyah*. Ibnu Khaldun pernah melukiskan betapa agama dapat menghasilkan transformasi sosial (*social transformation*). Sebaliknya manakala sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan maka akan lahir babak kehancuran dari peradaban (*the decay of civilization*). Konsep *tazkiyah* ini maka diharapkan terbentuk: konsep pembangunan Islami yang memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material; fokus usaha dengan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia; pembangunan ekonomi adalah aktifitas yang multidimensional; pembangunan ekonomi menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif; dan adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan ini dilaksanakan dengan semangat keadilan.

Kebijakan pembangunan Islami yang ideal harus berorientasi untuk: meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas sumber daya yang tersedia; dan menjamin keadilan distributif dan

⁹Ali Sakti, 2003. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI), hal. 16.

¹⁰M. Umar Chapra (2001), *op. cit.*, hal. 49-53.

¹¹Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembangunan Ekonomi Ummat", dalam Ainur R. Sophian (Ed) *Ibid*, hal 63-65.

memberantas praktik eksploitasi. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Sebuah doktrin yang melekat dan menyatu dalam kepribadian masyarakat (*built-in in-doctrination*). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitikberatkan pada nilai-nilai moral.

Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah; *pertama*, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru. *Kedua*, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, *ketiga* menegakkan nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*legal enforcement*). Juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti; pelatihan dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian yang cukup, perumahan yang nyaman, lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang layak, dan fasilitas transportasi. Ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan yang terbaik. Peranan negara ini tidak bisa disamakan dengan istilah ‘*intervensi*’ negara dibawah sistem kapitalis.¹²

Kehidupan masyarakat yang diharapkan adalah proses secara bertahap untuk mencapai kejayaan suatu masyarakat. Masa kejayaan senantiasa membawa kemajuan dan kemakmuran, begitupula masa kemunduran peradaban Islam juga ditandai oleh kedzaliman, kemiskinan, dan kelaparan. Hal ini setidaknya yang dipotret oleh Ibnu Khaldun ketika menganalisis “*sejarah peradaban/sejarah dinasti*”. Dari pandangan beliau kemudian masyurlah “delapan prinsip kebijaksanaan (*kalimat hikamiyyah*)” dalam karya besarnya *Muqaddimah* yang kemudian diformulasi oleh Umar Chapra menjadi “*siklus rantai reaksi*” untuk melihat proses “*kemajuan-kemakmuran*” atau “*kemunduran-kemiskinan*” suatu bangsa.

Kalimat hikamiyyah Umar Chapra membuat rumusan yang mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun. Rumusan tersebut interdisipliner menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk *Syari’ah* (S), kekuasaan politik atau *waazi*’ (G=*government*), masyarakat atau *rijal* (N=*number of people*), kekayaan atau sumber daya atau *Maal* (W=*wealth*), pembangunan atau *imarah* (g=*development*) dan keadilan atau ‘*adl* (j=*justice*).¹³ Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Di dalam analisa jangka panjang rumusan ini, tidak ada klausa *ceteris paribus* karena tidak ada satu variabel pun yang konstan. Dalam bagian berikut ini akan diulas bagaimana peran manusia

¹²M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), *Ibid*, hal. 23-35.

¹³M. Umer Chapra, *op. cit.*, hal. 145-241.

yang didorong oleh paradigma berfikirnya akan dibedah. Manusia dalam konsep teori ekonomi konvensional memiliki persoalan serius, karena gagal mengabstraksikan filosofi manusia dalam teorinya.

Prilaku Ekonomi Yang Diharapkan

Dalam konsep Islam, prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan seharusnya berpijak pada landasan-landasan syari'ah. Selain itu, juga mempertimbangkan kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah. Di lain pihak, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini terdapat dua makna penting; *pertama*, definisi ini menunjukkan prilaku manusia tersebut terfokus sebagai prilaku yang bersifat individual. *Kedua*, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakekatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.¹⁴

Definisi ekonomi konvensional ini berkembang dari pemahaman motif ekonomi yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi kapitalis. Francis Ysidro Edgworth (1845-1926) merupakan tokoh sentral yang mengemukakan motif *self interest* (*egoism* dan *utilitarianism*) dari prilaku ekonomi manusia. Dalam pertemuan intelektual mengenai motif prilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional, sesungguhnya telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki andil dalam prilaku ekonomi manusia. Namun Edgworth (1881) memiliki alasan kuat bahwa hanya egoismelah yang menjadi landasan nilai yang sangat konsisten bagi prilaku manusia (*egoistic behaviour*). Landasan nilai egoisme ini menurut Amartya Sen (1979) kemudian menjadi motif ekonomi yang menggunakan pendekatan rasional (*rational choice*). Pendekatan rasional ini diyakini menunjukkan konsistensi internal dari seorang individu dalam berperilaku. Berdasarkan landasan inilah kemudian secara substansi ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan.¹⁵

Ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan diatas. *Pertama* adalah sumber landasan nilai yang muncul. M.N. Siddiqi¹⁶ mengemukakan bahwa sumber utama dari prilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan

¹⁴Ali Sakti, *op. cit.*, hal. 16.

¹⁵Lihat paper Amartya K. Sen, "Rational Fool: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory", dalam buku, *Philosophy and Economic Theory*, yang dieditori oleh Frank Hahn and Martin Hollis, Oxford University Press (1979), hal. 87-109. Lihat juga F.Y Edgworth, *Mathematical Psychic: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*, (London, 1881).

¹⁶Muhammad Najatullah Siddiqi, 1995. *Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), (USA: Herndon, Virginia), hal. 255.

as-Sunnah. Pengetahuan itu bukan buah pikiran pakar ekonomi Islam, tapi ide langsung dari Allah SWT. Sementara itu sumber pengetahuan dari perilaku dan institusi ekonomi konvensional adalah intelegensi dan intuisi akal manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif perilaku itu sendiri. Ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan di atas nilai altruisme, sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.

Sekian banyaknya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam, setidaknya terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam.¹⁷ *Pertama*, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah dalam kerangka halal. Usaha-usaha tersebut tidak bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi (*gharar*) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah. Hal ini juga berlandaskan pada surah al-Baqarah ayat 72 & 168 serta an-Nisaa ayat 29. Dalam ekonomi Islam pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang aktifitas itu secara syariah. *Kedua*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*). Prinsip ini sejalan dengan al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 31-32 & al-Israa ayat 29.

Ketiga, implementasi Zakat (*implementation of zakat*). Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat. Prinsip ini sebagaimana diisyaratkan dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103. *Keempat*, penghapusan/pelarangan Riba atau Bunga (*prohibition of riba*), *Gharar* dan *Maisir*. Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, spekulasi atau judi. Sebagaimana surah al-Baqarah ayat 274-281 menjelaskan tentang hal tersebut. Keempat prinsip utama ini tentu bukan hanya memberi batasan-batasan moral saja dalam aktifitas dan sistem ekonomi Islam, tetapi juga memiliki konsekuensi yang menciptakan bangunan ekonomi Islam.

Konsekuensi eksistensi lembaga Baitul Mal sebagai respon langsung dari ketentuan implementasi sistem zakat dalam kebijakan fiskal Negara. Atau dominasi konsep bagi hasil dalam dunia keuangan dan investasi sebagai konsekuensi pelarangan bunga (riba). Juga adanya lembaga al-Hisbah untuk mengawasi pasar. Prinsip-prinsip ini utamanya dimaksudkan agar segala aktifitas

¹⁷Ali Sakti, *op. cit.*, hal. 20.

manusia betul-betul dapat mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dari perilaku individual dan juga kolektif yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*).¹⁸ *Mashlahah* merupakan motif yang dominan diantara ketiga motif yang ada, Akram Khan menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah parameter perilaku yang bernuansa *altruism* (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar, di mana manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.

Dalam paradigma ekonomi Islam harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept*, yang sebaiknya mengalir. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan.¹⁹ Muhammad Arif²⁰ menjelaskan bahwa ekonomi konvensional lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional sejalan dengan landasan filosofinya yang menjadikan kelimpahan materi sebagai parameter. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa kecenderungan pelaku pasar dalam sistem konvensional begitu konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis.

Prilaku Konsumsi Individu Dan Masyarakat

Beberapa ahli ekonomi Islam telah membuat kesimpulan menarik berkaitan dengan hubungan antara perilaku ekonomi (*economic behavior*) dan tingkat keyakinan atau keimanan individu atau masyarakat. Dalam pandangan tersebut disimpulkan, pada tingkatan realitas atau kenyataan, perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang atau masyarakat. Perilaku ini kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar.

¹⁸Muhammad Akram Khan, 1997. *The Role of Government in the Economy*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, hal. 157.

¹⁹Lihat Adiwarmarman Azwar Karim, 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), hal. 19 – 22.

²⁰Muhammad Arif, *Towards the Syari'ah Paradigm of Islamic Economics: The beginning of Scientific Revolution*, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 4, July 1985.

Kesimpulan tersebut menjelaskan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi:²¹ *Pertama*, ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau memproduksi akan didominasi oleh motif *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*). *Kedua*, ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (*materialisme*) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis. *Ketiga*, ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi individu atau masyarakat tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme. Dalam perilaku konsumsipun tak terlepas dari perspektif tersebut. Sesungguhnya motif berkonsumsi atau memproduksi individu atau masyarakat muslim seharusnya akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; *mashlahah*, kebutuhan dan kewajiban.²²

Sementara itu Yusuf Qardhawi²³ menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (*halal*), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Sedangkan pada perspektif konvensional, aktifitas konsumsi seseorang sangat erat kaitannya dengan pemaksimalan kepuasan (*utility*). John Hicks (1904-1989)²⁴ memberikan penjelasan tentang konsumsi ini menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama).

Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*budget constraint*). Tingkat pendapatannya akan dioptimalkan untuk memaksimalkan konsumsi barang/jasa, tabungan dan investasi untuk kepuasannya sendiri. Memaksimalkan kepuasan ini dipengaruhi oleh dorongan yang didominasi nilai individualisme, ego, keinginan dan rasionalisme. Jauh dari nilai altruisme. Bagi individu atau masyarakat muslim, pendapatan (*income*) merupakan alat untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia akherat (*falah*).

Monzer Kahf²⁵ melakukan analisis tajam mengenai “pengeluaran akhir” (*final spending/FS*) sebagai variabel standard dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh seorang konsumen muslim. Dalam konsep tersebut, beliau memasukan komponen zakat sebagai variabel yang menjadi keharusan dalam perilaku

²¹Lihat Ali Sakti, *op. cit.*, hal. 25.

²²Muhammad Akram Khan, *op. cit.*, hal. 157.

²³Yusuf Qardhawi, 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press). hal.15

²⁴Lihat pemikiran John Hicks dalam Steven Pressman, 2000. *Fifty Major Economists*. Edisi terj. “Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 196-202.

²⁵Monzer Kahf, 1992. *A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif*, (Malaysia: Longman), hal. 90 – 112.

konsumsi individu muslim (bagi yang mampu). Sehingga secara lengkap 'pengeluaran akhir (FS)' dari penghasilan yang didapat seorang muslim meliputi; konsumsi barang/jasa, tabungan, investasi, zakat, infak-shadaqah, serta wakaf bagi yang mampu. Hal ini didasari oleh semangat kemaslahatan bersama dan tumbuh suburnya nilai altruisme yang mengakar dalam individu dan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang hanya memasukan pengeluaran akhir individu kapitalis yang hanya mencakup; konsumsi barang/jasa dan maksimalisasi tabungan dan investasi saja. Selain itu terdapat konsep yang fundamental dalam paradigma konsumsi menurut Islam. Dalam konsepsi Islam; kebutuhan (*need*) berbeda dengan keinginan (*want*) dan syahwat (*desire*).

Dalam lingkungan masyarakat yang kapitalis tentu akan sangat sulit membedakan hal ini. Tetapi bagi individu atau masyarakat yang memiliki keimanan yang tinggi akan mudah membedakan hal ini. Kebutuhan (*need*) adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat hidup normal. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia dalam kondisi sengsara dan tidak dapat hidup normal. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada. Sedang keinginan (*want*) yaitu sesuatu tambahan-tambahan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Meski kepuasan sangat relatif bagi setiap orang, namun yang pasti, bila keinginan tidak terpenuhi maka kelayakan hidup tidak akan berkurang. Sedangkan syahwat (*desire*) merupakan dorongan dalam diri manusia yang diakibatkan oleh sifat-sifat buruk. Seperti dorongan kedengkian, iri hati, tamak, rakus, sombong, ingin dihormati dan lain lain. Syahwat inilah yang biasanya memunculkan keinginan yang tidak sehat pada diri manusia. Membuat tidak rasional dalam mencapai keputusan finansial.

Kemampuan membedakan antara kebutuhan, keinginan dan syahwat adalah bagian penting pada panduan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Karena kalau tidak dapat membedakan yang mana pengeluaran sebagai kebutuhan dan yang mana sebenarnya sebagai keinginan dan syahwat konsumsi, maka individu atau masyarakat akan menjadi boros. Boros dalam pandangan Islam sebagai bentuk kemubadziran. Tidak bisa membedakan antara syahwat, keinginan dan kebutuhan juga bisa membuat individu atau masyarakat tidak bisa menentukan dengan baik prioritas dalam melakukan pengeluaran. Malah, bisa jadi akan mengorbankan suatu kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan syahwat. Kesimpulan penting dari pandangan Islam untuk panduan konsumsi adalah meletakkan motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah*, kebutuhan dan ibadah.

Selain itu tujuan aktivitas ekonomi individu muslim adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Sehingga dengan motif dan tujuan ini perilaku ekonomi manusia yang diharapkan juga akan berorientasi pada semangat kesejahteraan bersama (*altruisme*). Individu dan Masyarakat akan mencapai kepuasan manakala "*pengeluaran akhir*" dari penghasilan mereka juga optimal untuk kedermawanan atau kesejahteraan

bersama seperti zakat, infak-shadaqah, serta wakaf dan bentuk kebaikan lainnya. Sangat menarik untuk mengkaji dampak ekonomi sebagai implikasi dari sikap kedermawanan pada masyarakat muslim dengan teori ekonomi yang ada. Perlu dikaji bagaimana Zakat dan Wakaf berpengaruh dalam perekonomian dan bekerja untuk membentuk masyarakat madani.

Lembaga Zakat Dalam Pembentukan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan;²⁶ *pertama*, golongan masyarakat Muzakki yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. *Kedua*, golongan masyarakat non-Mustahik/Muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (golongan *middle income*). *Ketiga*, golongan masyarakat Mustahik yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Golongan Muzakki adalah kelompok yang mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Bahkan mampu mengeluarkan infak-shadaqah dan wakaf. Bagi kelompok ini, harta merupakan alat untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Sehingga secara lengkap *final spending* (FS/pengeluaran akhir) dari penghasilan yang didapat kelompok ini meliputi; konsumsi barang/jasa, tabungan, investasi, zakat, bahkan infak-shodaqoh serta wakaf. Sehingga pengeluaran mereka akan banyak memberikan *falah*.

Sedangkan golongan *mid-income* mampu memenuhi kebutuhan primernya dan masih memiliki kemampuan untuk berkonsumsi barang sekunder. Meskipun begitu kekayaannya belum mencapai nisab. Sehingga dalam upaya memaksimalkan pengeluaran akhir-nya adalah untuk mencapai *al-falah*, golongan ini bisa mengeluarkan infak atau shodaqoh. Pada model konsumsi golongan Mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Masuk dalam kategori pengeluaran sepenuhnya bersumber dari zakat ini adalah; *fakir*, *ibnus sabil* dan *fisabilillah*. Karena mereka memang tidak memiliki penghasilan. Sedangkan sumber konsumsi Mustahik kategori miskin (*masakin*), yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus dipenuhi oleh zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (*guarantee of a minimum level of living*). Institusi negara yang bernama *Baitul Mal* dalam konsep ekonomi Islam yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut dengan mengambil kekayaan dari kelompok Muzakki untuk dibagikan kepada kelompok Mustahiq. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal maka seluruh masyarakat Islam diharapkan akan menjalankan secara leluasa segala kewajiban sebagai hamba Allah SWT, tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang mungkin memang diluar kemampuannya.

²⁶ Ali Sakti, *op. cit.*, hal. 26.

Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infak-shodaqoh dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu ummat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum. Karena itulah infak-shodaqoh dan instrumen sejenisnya inilah yang oleh *Baitul Maal* digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Jadi zakat dan infak shadaqah memiliki perannya masing-masing. Pada kondisi ummat yang baik dimana tingkat keimanannya pada *level* yang baik, maka pendapatan negara yang bersumber dari infak-shadaqah seharusnya akan lebih besar dari penerimaan zakat.

Jika, instrumen zakat sesungguhnya dapat digunakan sebagai perisai bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian berjalan pada tingkat minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui *Baitul Maal* yang menggunakan akumulasi zakat.²⁷ Bahkan Metwally²⁸ mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variable yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi (kejenuhan), seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *under-consumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.²⁹ Yang membedakan perekonomian Islam dengan ekonomi konvensional dalam hal ini adalah wujudnya instrumen yang bersifat terlembagakan dalam bangunan sosial dalam Islam, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya mereka yang tidak memiliki akses ekonomi), seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Oleh Faridi³⁰ mekanisme sosial ini disebut sebagai sektor sukarela (*voluntary sector*) atau sektor ketiga (*third sector*) untuk melengkapi sektor yang telah pernah ada (*monetary* dan *real sector*).

²⁷*Ibid.*, hal. 26.

²⁸Dalam papernya yang ada dalam buku Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), 1996. *Money and Banking In Islam*, International Center for Research In Islamic Economics, (Pakistan: King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad), hal. 17-18.

²⁹Ali Sakti, *op. cit.*, hal. 27.

³⁰F.R. Faridi, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam*, Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB), hal. 129-148.

Lebih lanjut Monzer Kahf,³¹ mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Investasi adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf,³² juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan risiko pembiayaan/kredit macet (*non-performing financing/NPF*), karena salah satu alokasi dana zakat adalah dipergunakan untuk menolong orang-orang yang terjebak hutang. Sehingga secara riil, zakat akan dapat menekan tingkat pengangguran.

Selain itu, dalam implementasi konsep dengan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme yang berbeda. *Pertama*, implementasi zakat itu sendiri dalam membutuhkan tenaga kerja. *Kedua*, perubahan golongan mustahik zakat yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi (muzaki), yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. *Ketiga*, *multiflier effect* munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat yang masih dalam kekurangan.

Lembaga Wakaf Dan Strateginya

Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-muslim boleh memiliki konsep *philanthropy* tetapi ia cenderung ‘seperti’ hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrument Zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mustahiq.

Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Mengeser ‘*private benefit*’ menuju ‘*social benefit*’.³³

³¹Monzer Kahf, *The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice*, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999, hal. 5.

³²*Ibid.*, hal. 6.

³³Abdul Aziz Setiawan, 2004. *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004 (Sya’ban 1425) hal. 50.

Sayangnya potensi wakaf, yang banyak dimiliki kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat Indonesia saja menurut data Depag (2003) mencapai 1.535,19 Km² - jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura- yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah *wakaf tunai* (dengan uang). *Wakaf tunai* sebenarnya sudah menjadi pembahasan Ulama terdahulu, salah satunya *Imam az-Zuhri* yang ternyata membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama *mazhab al-Syafi'i* juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana *wakaf tunai* untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya.

Keuntungan dari bagi hasil dapat digunakan untuk kepentingan umum. Jika *wakaf tunai* diimplementasikan maka, ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dalam 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 50.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 50 milyar setiap bulan (Rp 600 milyar per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat *return* 10 % per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 5 miliar setiap bulan (Rp 60 miliar per tahun). Apakah ini realistis? Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecilpun bisa menikmati pahala abadi wakaf, mereka tidak harus menunggu menjadi '*tuan tanah*' untuk menjadi *Muwaqif*, sehingga sangat potensial. Selain itu kalau kita menilik potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, kita akan optimis. Tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Disebutkan 96 % kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 % untuk lembaga keagamaan dan 77 % untuk lembaga non-keagamaan.

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi *wakaf* dan *wakaf tunai* dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat.³⁴ *Pertama*, Optimalisasi edukasi dan sosialisasi *wakaf* dan *wakaf tunai*. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesadaran berwakaf. *Kedua*, Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin. *Ketiga*, Membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah.

³⁴ *Ibid.*, hal. 51.

Pemerintah Arab Saudi, misalnya, belakangan mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya ‘*Bank Wakaf*’ di Bangladesh.

Dalam hal ini dapat dilihat dari keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran dari mahasiswanya. *Keempat*, Reoptimalisasi pemanfaatan asset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna, dan seterusnya. *Kelima*, Memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun diatas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki kemampuan bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil.

Keenam, Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Manan yang mendirikan “*Bank Wakaf*” dengan konsep *Temporary Wakaf*, dimana dana wakaf pemanfaatannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan nantinya pokok wakaf dikembalikan pada *Muwaqif*. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehanannya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan *Wakaf Tunai* untuk membiayai sektor investasi yang berisiko, dimana kemudian risiko ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan penjelasan tentang ekonomi Islam merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani terlihat bahwa sistem ekonomi yang telah dilakukan selama ini menunjukkan suatu kegagalan di dalam sistem ekonomi yang ada. Ekonomi Islam dapat membentuk suatu aturan dasar di dalam menjelankan perekonomian bagi masyarakat tersebut dengan merenovasi bentuk-bentuk instrument sehingga sistem ekonomi Islam senantiasa baru dari masa kemasa untuk menjalankan institusi instrument ekonomi Islam, yaitu: baitul maal, lembaga zakat, infak sedekah, lembaga wakaf dan sebagainya. Sebenarnya masih

banyak lagi instrument ekonomi Islam yang perlu dikembangkan dalam membentuk ekonomi masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Setiawan, 2004. *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004 (Sya'ban 1425).
- Adiwarman Azwar Karim, 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia).
- Amartya K. Sen, 1979. "Rational Fool: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory", dalam buku, *Philosophy and Economic Theory*. Frank Hahn and Martin Hollis, Oxford University Press.
- Ali Sakti, 2003. *Pengantar Ekonomi Islam*", Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI.
- Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Ummat*, dalam Ainur R. Sophian (Ed).
- Ali Sakti, *Kegagalan Ekonomi Global*. Republika, 14 Maret 2002.
- Amich Alhumami, *Negara Kesejahteraan*. Kompas, 17/10/2005
- David Bell dan Irving Kristol, 1981. *The Crisis of Economics Theory*. New York: Basic Books.
- F.Y Edgeworth, 1981. *Mathematical Psychic: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. London.
- F.R. Faridi, "A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, *Readings in Public Finance in Islam*", Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).
- Gunnar Myrdal, 1970. *Objectivity in Social Research*. London: Gerald Duckworth.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", *Islamia Tahun II No. 5*, April-Juni 2005.
- Hutchinson, T.W., 1964. *Positive Economics and Policy Judgement*. London: Alien & Unwin.
- John Hicks dalam Steven Pressman, 2000. *Fifty Major Economists*. Edisi terj. "Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurt Dopfer, 1976. *Economics in The Future: Towards a New Paradigm*, London: Macmilan.
- Khursid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam Ainur R. Sophian (Ed), 1997. *Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Laporan The United Nations Human Development Report, 1999 sebagaimana dikutip dalam laporan spesial The International Forum on Globalization (IFG), 2003. *Does Globalization Help The Poor?*, edisi terjemah, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

- Laporan Shukor Rahman dalam *New Straits of Malaysia Times*, 2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG, Ibid.
- Laporan World Bank, 2004.
- Laporan Gatraonline, 26 Desember 2001.
- M. Umar Chapra, 2001. *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Edisi terjemah, Jakarta: SEBI.
- M. Umer Chapra, *Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi*, dalam Ainur R. Sophian (Ed).
- Muhammad Najatullah Siddiqi, 1995. *Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA: Herndon, Virginia.
- Muhammad Akram Khan, 1997. *The Role of Government in the Economy*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2.
- Muhammad Arif, 1985. *Towards the Syari'ah Paradigm of Islamic Economics: The beginning of Scientific Revolution*, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 4, July.
- Monzer Kahf, 1992. *A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif*, Malaysia: Longman Malaysia.
- Monzer Kahf, 1999. *The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice*, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April.
- M. Umer Chapra, "Islam and Economic Challenge", yang diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri menjadi, 2000. *Islam dan tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute.
- Robert Kaplan dalam *The Atlantik Montly*, 1997 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG.
- Robert L. Heilbroner, "Economics as a 'Value-Free' Science". *Social Research*, 1973.
- Richard Quinney, "The Prophetic Meaning of Modern Welfare State", 1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, "Negara Kesejahteraan", Kompas, 17/10/2005.
- Thomas Balogh, 1982. *The Irrelevance of Conventional Economics*, London: Weidenfeld & Nicolson.
- Yusuf Qardhawi, 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press.
- Zainuddin Ahmed, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), 1996. "Money and Banking In Islam", International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, Pakistan